PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN
(Studi Kasus Pada 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia)

Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si
Ventideria Marsha Mirnanda M.
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Abstract

Fiscal decentralization is when local government granted autonomy from central government to manage the budget that given. While the intergovernmental transfer is a transfer funds from the state budget allocated to the region in framework of decentralization. Income disparity is a reflection of the gap in development distribution results of a country among population. This study aims to provide empirical evidence about the effects of fiscal decentralization on intergovernmental transfers and the implications for income disparities.

The population are 33 provinces government in Indonesia. Sampling technic using saturated sample where all population being sampled. The analytical method used is descriptive analysis and verificative. This study were analyzed using path analysis equation to determine how much correlation and determination of variables to be concluded.

Hypothesis testing results show that (1)fiscal decentralization has strong influence on intergovernmental transfers and (2)intergovernmental transfers has strong influence on income disparity.

Keywords: Fiscal Decentralization, Intergovernmental Transfer, Income Disparity

I. Pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perubahan sistem tatanan pemerintahan di Indonesia melahirkan adanya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dilimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang disebutkan oleh Saragih (2003:83). Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di setiap daerah dengan harapan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dan serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari pemerintah daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah menjadikan daerah untuk memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan kepemerintahan secara mandiri.

Sebagai pelaksana utama pembangunan di daerahnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah . Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money folow functions, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya.

Namun kenyataanya pemerintah Indonesia belum mampu melaksanakan tujuannya tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi sejak tahun 2001, dinyatakan bahwa jumlah dana transfer ke daerah yang digelontorkan pemerintah terus meningkat. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, jumlah dana yang ditransfer pusat ke daerah pada 2001 sebesar Rp 81,1 triliun, pada 2010 sebesar Rp 344,7 triliun, dan pada 2015 mencapai Rp 664,6 triliun. Rata-rata transfer ke daerah mengambil porsi 30% dari total belanja APBN. Jumlah yang sangat besar tersebut ternyata belum memberi dampak pada kesejahteraan rakyat di daerah sesuai harapan desentralisasi fiskal. Sehingga pada Desember 2014, Menkeu Bambang Brodjonegoro menetapkan aturan tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014. Penetapan PMK itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran transfer ke daerah serta perubahan kebijakan penetapan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah diatur dalam peraturan presiden.

Dengan adanya dana transfer daerah dan dana desa yang digelontorkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah; mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah; memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana; dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

Melihat tujuannya itu, keberadaan dana transfer daerah merupakan suatu kebijakan yang sangat baik dan patut didukung sepenuhnya. Namun, dana besar yang dikeluarkan itu belum memberikan bukti nyata bagi kesejahteraan rakyat di daerah. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal adalah mengatasi adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini ditunjukkan pada fakta di lapangan saat ini, dimana 10 tahun terakhir ini, tingkat disparitas pendapatan(ketimpangan) meningkat cukup tinggi yang tercermin dari angka terakhir Rasio Gini sebesar 0,41. Sejumlah analis mengatakan, angka disparitas dalam kenyataannya lebih tinggi lagi karena indikator pengeluaran bias dan tak sensitif terhadap pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas. Memburuknya disparitas sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan keparahan kemiskinan. Berbagai pihak mengaitkan disparitas dengan pola pembangunan yang tak berpihak ke kelompok miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Pada 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia 31,02 juta orang atau 13,33% dari jumlah penduduk. Lalu, pada 2012, penduduk miskin 28,59 juta orang (11,66%) dan pada 2014 sebanyak 28,28 juta orang (11,25%). Meski angkanya semakin kecil, namun penurunan jumlah penduduk miskin itu belum signifikan.

Dari fenomena di atas sudah pernah diadakan penelitian sebelumnya. Tetapi fenomena ini masih belum teratasi sampai saat ini. Neberapa peneliti mengamati masalah desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bepengaruh sangat kuat tehadap disparitas pendapatan. Dalam aspek desentralisasi fiskal yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, jika diterapkan dengan baik maka tingkat disparitas pendapatan tidak akan terlalu tinggi. Penerapan desentralisasi fiskal dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu mengelola dana transfer pemerintah pusat secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat Dan Implikasinya Terhadap Disparitas Pendapatan (Studi Kasus pada 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun uraian dari latar belakang penelitian dan identifikasi penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat.

2. Seberapa besar pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Disparitas Pendapatan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mencari kebenaran dari desentralisasi fiskal pemerintah daerah berpengaruh terhadap transfer pemerintah pusat dan dampaknya terhadap disparitas pendapatan dengan menggunakan data yang diperoleh dan pengujian empiris.

1.3.2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Disparitas Pendapatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Disparitas Pendapatan yang terjadi di Indonesia maupun masalah pada Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerahnya dan Transfer Pemerintah Pusat. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena pada disparitas pendapatan dapat diperbaiki melalui adanya Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat yang sesuai dengan standar yang ada.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada dan diharapkan dapat menunjukan bahwa disparitas pendapatan dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal pemerintah daerah dan tranfer pemerintah pusat yang menjadi variabel *intervening*-nya.

II. Kajian Pustaka,Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Desentralisasi Fiskal

Pengertian desentralisasi fiskal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

"Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dalam bidang fiskal".

Sedangkan menurut Saragih(2003:83) desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai berikut:

"Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan".

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah kebijakan otonomi suatu pemerintah daerah yang menerima pelimpahan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat demi membangun pemerintahan daerah yang baik.

2.1.1. Transfer Pemerintah Pusat

Pengertian transfer pemerintah pusat menurut DKRI[1] adalah sebagai berikut:

"Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian".

2.1.3. Disparitas Pendapatan

Menurut Dumairy (1999) dalam Imamul Arifin(2007:83) ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan adalah:

"Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya".

[1] DKRI adalah kepanjangan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia

Menurut Todaro(2011:89) Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu;

"distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi".

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat

Desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat menurut Prud'-homme(2001:4), yaitu:

"salah satu instrumen untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang benar adalah transfer pusat"

2.2.2. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Disparitas Pendapatan

Transfer pemerintah pusat terhadap disparitas pendapatan menurut Dumairy (1999) dalam Imamul Arifin(2007:83) ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan adalah:

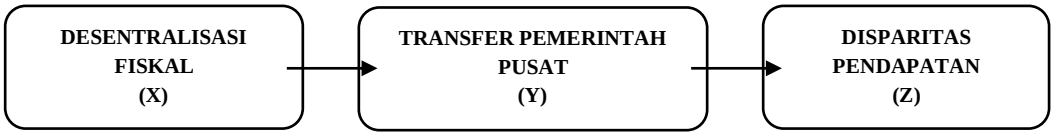
"Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya transfer dana dan pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya".

Hasil pembangunan suatu negara merupakan tujuan dari distribusi transfer fiskal. Menurut Schroeder dan Smoke(2003:17) secara teori, justifikasi untuk transfer dari Pusat ke Daerah adalah untuk mencapai:

"transfer bertujuan untuk mencapai pemerataan fiskal vertikal, pemerataan fiskal horizontal"

Dari penjabaran di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan secara sederhana pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian



Gambar di atas menunjukkan paradigma dari penelitian yang akan diteliti, dimana Desentralisasi Fiskal (Variabel X) terhadap Transfer Pemerintah Pusat (Variabel Y) dan terhadap Disparitas Pendapatan (Variabel Z).

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono(2012:64) pengertian hipotesis yaitu:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Sedangkan Menurut Umi Narimawati(2010:26) hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

"Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Transfer Pemerintah Pusat

H2 : Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan.

III. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati(2010:29) objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Menurut Sugiyono(2012:32) objek penelitian sebagai berikut:

"Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan tertentu. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, transfer pemerintah pusat dan disparitas pendapatan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono(2012:2) metode penelitian sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono(2011:21) metode deskriptif sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Metode deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan hasil penelitian dalam menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masingmasing variabel yang diteliti.

Sedangkan menurut Masyhuri(2008:45) dalam Umi Narimawati(2010:29) metode verifikatif sebagai berikut:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Menurut Sugiyono(2011:8) metode penelitian kuantitatif sebagai berikut:

"Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh variabel X(Desentralisasi Fiskal) terhadap Y(Transfer Pemerintah Pusat) dan dampaknya pada Z(Disparitas Pendapatan). Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif. Metode verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode verifikatif akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.3 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Menurut Moh. Nazir(2009:84) desain penelitian sebagai berikut:

"Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati(2010:30) yang peneliti terapkan dalam penelitian sebagai berikut:

" 1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi;
3. Menetapkan rumusan masalah;
4. Menetapkan tujuan penelitian;
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori;
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan;
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data;

8. Melakukan analisis data; dan
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan desain penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitan	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode Pengumpulan Data**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T-1	*Deskriptif &Verifikatif*	*Descriptive & Explanatory Survey*	33 Provinsi Indonesia	Time Series
T-2	*Deskriptif & Verifikatif*	*Descriptive & Explanatory Survey*	33 Provinsi Indonesia	Time Series

Dari tabel di atas dapat penulis uraikan sebagai berikut:

T-1 : Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat.

T-2 : Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Disparitas Pendapatan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono(2012:38) variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

"Sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

Sedangkan definisi operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro(2002:69) adalah sebagai berikut:

"Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan dampaknya pada disparitas pendapatan, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel *Independent* (X)

   Menurut Sugiyono(2014:61), pengertian variabel *independent* adalah sebagai berikut:

   "Variabel *Independent* (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat)".

   Variabel bebas (X) yang diteliti dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal.
2. Variabel *Intervening* (Y)

   Menurut Sugiyono(2014:63), pengertian variabel *intervening* adalah sebagai berikut:

   "Variabel intervening (penghubung) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur".

   Variabel *intervening* atau penghubung (Y) pada penelitian ini adalah Transfer Pemerintah Pusat.
3. Variabel *Dependent* (Z)

   Menurut Sugiyono(2014:61), pengertian variabel *dependent* adalah sebagai berikut:

   "Variabel *dependent* (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

   Variabel *dependent* atau variabel terikat (Z) pada penelitian ini adalah Disparitas Pendapatan.

   Sesuai dengan judul penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat dan Dampaknya Pada Disparitas Pendapatan, maka dapat disajikan dalam operasional variabel pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
(Variabel X) Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan". **Saragih (2003:83)**	• Rasio PAD terhadap TPD • Rasio BHPBP terhadap TPD • Rasio SB terhadap TPD **Reksohadiprodjo (2000:201)**	Rasio
(Variabel Y) Transfer Pemerintah Pusat	Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. **Departemen Keuangan RI**	• Dana Perimbangan • Dana Otonomi Khusus • Dana Penyesuaian **UU No. 33 Tahun 2004 (Pasal 6)Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**	Rasio
(Variabel Z) Disparitas Pendapatan	Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya **Imamul Arifin (2007:83)**	• PDRB • Jumlah Penduduk **Arsyad (2004:44)**	Rasio

Penelitian ini menggunakan skala rasio. Menurut Riduan dan Kuncoro(2012:19), pengertian skala rasio adalah sebagai berikut:

"*Ratio Scale* adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang tidak sama".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak, dimana angka nol mempunyai makna, sehingga angka nol dalam skala ini diperlukan sebagai dasar dalam perhitungan dan pengukuran terhadap objek yang diteliti dan jarak antar kategorinya tidak sama karena bukan dibuat dalam rentang interval.

3.5. Sumber Data

Menurut Sugiyono(2010:137), pengertian sumber sekunder adalah sebagai berikut:

"Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen".

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh

pihak lain baik dari objek individual maupun dari suatu badan (instansi). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi berupa Laporan Realisasi APBD Transfer Pusat, Rasio Desentralisasi Fiskal dan Gini Rasio tahun 2013, serta gambaran umum instansi, aktivitas dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian dari 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia.

3.6. Populasi dan Sampel

Menurut Umi Narimawati(2010:37), pengertian populasi adalah sebagai berikut:

"Objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Menurut Sugiyono(2014:118), pengertian sampel adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Teknik yang akan digunakan oleh penulis sesuai dengan judul adalah *nonprobability sampling*. Jenis *nonprobability sampling* yang akan digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh.

Menurut Sugiyono(2014:124), pengertian dari sampling jenuh atau sensus adalah sebagai berikut:

"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel".

Dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 33 sampel dari pemerintah provinsi di Indonesia.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu: Penelitian lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

3.8 Metode Pengujian Data

3.8.1. Rancangan Analisis data Deskriptif

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variabel penelitian.

3.8.2. Rancangan Analisis data Verifikatif

Dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan, adalah metode verifikatif. Verifikatif adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik.

Metode verifikatif menurut Mashuri(2009:45) menyatakan:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Menurut Umi Narimawati(2010:46), yaitu:

"Analisis Data Verifikatif adalah Data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner akan diolah dengan pendekatan kuantitatif".

Selanjutnya analisis yang digunakan dalam metode penelitian verifikatif adalah :

1. Pengujian Normalitas Data

   Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi.

   Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Menurut Singgih Santoso (2002:393), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

   a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
   b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

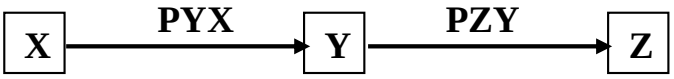
   Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal Probability Plots dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan :

c) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
d) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

2. Analisis jalur (*Path Analysis*)

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif juga menggunakan metode verifikatif. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik, yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Model analisis jalur, adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Z = Disparitas Pendapatan
Y = Transfer Pemerintah Pusat
X = Desentralisasi Fiskal
PYX = Koefisien jalur Desentralisasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat
PZY = Koefisien jalur Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal

3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujiannya menggunakan pendekatan koefisien korelasi *Pearson* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum y)}{\sqrt{\{n\left(\sum Xi^2\right) - (\sum Xi)^2\}\{n\left(\sum yi^2\right) - (\sum yi)^2\}}}$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:49)

dimana : -1 r +1
r = koefisien korelasi
x = Desentralisasi fiskal, Transfer pemerintah pusat
z = Disparitas pendapatan
n = jumlah responden

Ketentuan untuk melihat tingkat keeratan korelasi digunakan acuan pada tabel 3.2:

Tabel 3.1
Tingkat Keeratan Korelasi

0 – 0.20	Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
0.21 – 0.40	Korelasi yang lemah
0.41 – 0.60	Korelasi sedang
0.61 – 0.80	Cukup tinggi
0.81 – 1	Korelasi tinggi

4. Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variabel bebas atas nilai variabel bebas ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik

untuk mengestimasi variabel terikat. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan Microsoft Excel/SPSS atau secara manual didapat dari R2=SSreg/Sstot.

$$Kd = r^2 \, x \, 100\%$$

Dimana :
d = Koefisien Determinasi
r = Koefisien Korelasi

3.8.3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat, Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Disparitas Pendapatan, serta Pengaruh Desntraliasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat dan Implikasinya terhadap Disparitas Pendapatan. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan path analisis.

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil penelitian maka perlu dilakukan dengan Uji t (Uji Parsial). Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui Pengaruh Desntraliasi Fiskal terhadap Transfer Pemerintah Pusat dan Implikasinya terhadap Disparitas Pendapatan.

Melakukan uji-t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut:

1. Rumus uji t yang digunakan adalah:

RUMUS T HITUNG

$$t_{hit} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:
r : koefisien korelasi
n : jumlah responden, (n-2=dk, derajat kebebasan)

Sumber : Sugiyono (2008:184)

Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

2. Hipotesis
   H0;ρ = 0, Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap transfer pemerintah
   Ha;ρ ≠ 0, Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap transfer pemerintah
   Hb;ρ = 0, Penerapan transfer pemerintah tidak berpengaruh pada disparitas pendapatan
   Hc;ρ ≠ 0, pendapatan transfer pemerintah berpengaruh pada disparitas penerapan
3. Kriteria Pengujian
   H0 ditolak apabila thitung < dari ttabel (α = 0,05)
   Kriteria Penarikan Pengujian:

Jika menggunakan tingkat kekeliruan (= 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. Jika thitung ⩾ ttabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
b. Jika thitung ⩽ ttabel maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.
c. Jika thitung ⩾ ttabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel Y dan variabel Z ada hubungannya.

d. Jika thitung ⩽ ttabel maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel Y danvariabel Z tidak ada hubungannya

IV. Hasil Penelitian

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 4.1

Tabel Realisasi Data dari Anggaran Tahun 2013

	Provinsi	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Tranfer Pusat (000 rupiah)	Gini Rasio (%)
1	Aceh	98,84	9.330.839,00	34,10
2	Sumatera Utara	98,52	3.251.772,00	35,40
3	Sumatera Barat	71,64	1.240.880,00	36,30
4	Riau	80,53	3.610.182,00	37,40
5	Jambi	99,91	1.814.055,00	34,80
6	Sumatera Selatan	71,72	2.644.843,00	38,30
7	Bengkulu	99,60	1.169.073,00	38,60
8	Lampung	98,75	2.108.223,00	35,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	100,00	1.033.324,00	31,30
10	Kepulauan Riau	79,49	1.477.316,00	36,20
11	DKI Jakarta	95,90	11.517.024,00	43,30
12	Jawa Barat	99,84	6.857.409,00	41,10
13	Jawa Tengah	99,69	5.104.916,00	38,70
14	DI Yogyakarta	99,16	1.356.662,00	43,90
15	Jawa Timur	96,68	5.434.710,00	36,40
16	Banten	80,69	1.126.004,00	39,90
17	Bali	99,01	1.553.987,00	40,30
18	Nusa Tenggara Barat	65,78	1.075.005,00	36,40
19	Nusa Tenggara Timur	98,97	1.858.795,00	35,20
20	Kalimantan Barat	71,66	1.382.042,00	39,60
21	Kalimantan Tengah	97,82	1.690.869,00	35,00
22	Kalimantan Selatan	98,57	1.812.350,00	35,90
23	Kalimantan Timur	99,73	5.730.390,00	37,10
24	Sulawesi Utara	99,93	1.271.907,00	42,20
25	Sulawesi Tengah	99,32	1.466.151,00	40,70
26	Sulawesi Selatan	99,61	2.297.581,00	42,90
27	Sulawesi Tenggara	98,89	1.451.899,00	42,60
28	Gorontalo	99,82	844.914,00	43,70
29	Sulawesi Barat	51,08	772.106,00	34,90
30	Maluku	99,86	1.240.685,00	37,00
31	Maluku Utara	73,12	1.089.022,00	31,80
32	Papua Barat	100,00	5.401.414,00	43,10
33	Papua	66,10	7.438.399,00	44,20
	Rata-Rata	**90,61**	**2.953.174,18**	**38,30**
	Terbesar	**100**	**11.517.024,00**	**44,20**
	Terkecil	**51,08**	**772.106,00**	**31,30**

Tabel di atas mendeskripsikan data realisasi rasio desentralisasi fiskal, transfer pusat, dan rasio disparitas pendapatan (gini rasio) pada 33 pemerintah provinsi Indonesia. Rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 90,61%, transfer pemerintah sebesar Rp2.953.174,18(perseribu), dan rasio gini sebesar 38,30%.

Rasio desentralisasi fiskal tertinggi sebesar 100% pada provinsi Papua Barat, dan Kepualauan Bangka Belitung yang menandakan bahwa provinsi tersebut sudah mampu menerapkan desentralisasi fiskalnya dengan baik. Rasio desentralisasi fiskal terendah sebesar 51,08% pada provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Barat belum mampu menjalankan desentralisasi fiskal dan masih bergantung dengan pemerintah pusat.

Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan adalah daerah provinsi DI Yogyakarta. Meskipun daerahnya mampu mengelola kebijakan desentralisasi fiskal sebesar 99,16% di atas rata-rata, tetapi juga memiliki tingkat ketimpangan terbesar di provinsi Indonesia sebesar 43,90% melebihi rata-rata ketimpangan Indonesia yang sebesar 41%.

4.1.2. Hasil Analisis Verifikatif

Pada bagian ini akan uraikan hasil analisis verifikatif mengenai desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan implikasinya terhadap disparitas pendapatan.

Untuk menjawab permasalah tersebut akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan pertama penulis menguji distribusi data dengan uji normalitas.

Tabel 4.2
Uji Normalitas Variabel
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Transfer	Disparitas	Desentralisasi_Fiskal
N		33	33	33
Normal Parameters[a,b]	Mean	2953174,1818	38,3000	90,6130
	Std. Deviation	2679437,36607	3,59931	13,86619
Most Extreme Differences	Absolute	,265	,125	,345
	Positive	,265	,125	,249
	Negative	-,208	-,103	-,345
Kolmogorov-Smirnov Z		1,520	,721	1,985
Asymp. Sig. (2-tailed)		,020	,677	,001

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel terdistribusi normal.

Sebelum melakukan uji analisis jalur, penulis melakukan uji korelasi antara ketiga variabel. Hasil dibawah ini menunjukkan bahwa korelasinya diantara ketiga variabel adalah signifikan.

Tabel 4.3
Uji Korelasi Pearson
Correlations

		Transfer	Disparitas	Desentralisasi_Fiskal
Transfer	Pearson Correlation	1	,227	,155
	Sig. (2-tailed)		,203	,389
	N	33	33	33
Disparitas	Pearson Correlation	,227	1	,158
	Sig. (2-tailed)	,203		,381
	N	33	33	33
Desentralisasi_Fiskal	Pearson Correlation	,155	,158	1
	Sig. (2-tailed)	,389	,381	
	N	33	33	33

Selanjutnya analisis jalur (*path analysis*) yang akan disajikan dalam dua sub struktur. Untuk sub strukur pertama akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentraliasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat,

sedangkan sub struktur kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap disparitas pendapatan.

4.2.2.1. Pengaruh Desentraliasi Fiskal Terhadap Transfer Pemerintah Pusat

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien jalur sub pertama sebagai berikut:

Tabel 4.4
Analisis Jalur Sub Pertama
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	241239,810	3141951,225		,077	,939
	Desentralisasi_Fiskal	29928,746	34287,283	,155	,873	,389

a. Dependent Variable: Transfer

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal bernilai 0,873 yang berarti sebesar 87,3% desentralisasi fiskal mempengaruhi Transfer Pemerintah Pusat.

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi Sub Pertama
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,155[a]	,0624	-,007	2689460,72494

a. Predictors: (Constant), Desentralisasi_Fiskal

Dari hasil R Square menunjukkan bahwa Transfer Daerah mempengaruhi Desentralisasi Fiskal dengan sangat kuat.

4.2.2.2. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Disparitas Pendapatan

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi Sub Kedua
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,259[a]	,067	,005	3,59055

a. Predictors: (Constant), Transfer, Desentralisasi_Fiskal

Dari hasil Determinasi R Square menunjukkan bahwa sebanyak Transfer Daerah berpengaruh kuat terhadap Disparitas Pendapatan.

Tabel 4.7
Analisis Jalur Sub Kedua
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34,524	4,195		8,230	,000
	Desentralisasi_Fiskal	,033	,046	,125	,703	,488
	Transfer	2,793E-7	,000	,208	1,165	,253

a. Dependent Variable: Disparitas

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tranfer Pemerintah Pusat bernilai 0,253 yang berarti sekitar 25,3% mempengaruhi Disparitas Pendapatan.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari hipotesis yang diuji menunjukkan hasil bahwa variabel desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh yang sangat erat. Selain itu, uji hipotesis terhadap pengaruh desentralisasi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat dan implikasinya terhadap disparitas pendapatan menunjukkan hasil dimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap disparitas pendapatan yangmana transfer pemerintah pusat menjadi penghubung diantara kedua variabel tersebut. Jika desentralisasi fiskalnya tinggi, tetapi transfer pemerintah pusatnya rendah, maka disparitas pendapatannya juga akan rendah.

5.2. Saran

Pemerintah provinsi Indonesia harus mampu untuk tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dalam membangun perekeonomian provinsinya.

VI. Daftar Pustaka

Andry Muhammad. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008.* Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 9, No. 1, p. 1-20.

Aulia Nely. 2014. *Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. ISSN: 2252-6765, Vol. 3, p. 327-336. Universitas Negeri Semarang.

Delis, Rosmeli, dan Novita. 2009. *Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008*. Universitas Jambi.

Gilarso T. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, Edisi Revisi.

Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daera*h. Yogyakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.

Harun, Lukman dan Maski, Ghozali. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya.

Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Imamul Arifin. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Setia Purna Inves.

Luiz R. 2000. *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis*. World Development. ISSN: 0305-750X, Vol. 28, No. 2, p. 365-380. University of Kent, United Kingdom.

Mardiana dan Syafril Basri. 2012. *Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi. Vol. 20, No. 4. Universitas Riau.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Narimawati Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.

Narimawati Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Jakarta: Genesis.

Oktavilia Shanty. 2011. *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan*. ISSN: 2089-3590, Vol. 2, No. 1, p. 219-228. Universitas Islam Bandung.

Prud'homme Remy. *Policy Research Working Paper 1252: On the Dangers of Decentralization*. Policy Research Dissemination Centre. Washington DC.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Niaga Swadaya.

Suara Pembaruan. Jumat, 5 Juni 2015. *Efektivitas Dana Transfer Daerah*. sp.beritasatu.com:2015.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan Ke-12*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan Ke-14*. Bandung: Alfabeta.

Todaro, M.P. dan Stephen C.S. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, Edisi Kesembilan.

Umiyati Etik. 2012. *Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dalam Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol. 1, No. 5, p. 15-21. Universitas Jambi.

Waluyo Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*. Universitas Indonesia.

Wardhana Adhitya, dkk. 2013. *Dampak Transfer Pemerintah Pusat terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol. 15, No. 2, p. 111-118. Universitas Padjajaran.